

KNPI
Rukmini, Rais, Winarno

PERANAN KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) DALAM PEMBANGUNAN POLITIK: STUDI KASUS DI JAWA BARAT

The Role of The National Committee of Indonesian Youth (KNPI) in Political Development:

A Case Study in West Java

Tati Rukminijati¹⁾, Amien Rais²⁾ dan Budi Winarno²⁾

Program Studi Ilmu Politik
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This research tries to explain the role of interest group, as one of the component of political system in Indonesia. The purpose of this study is to describe and to analyze the role of The National Committee of National Youth (KNPI) in Indonesia in political development. This study took place in West Java.

This research applies the descriptive analytical method. The primary data collection has been carried out technically through observations, and depth interviews with prominent young leaders: such as leaders of youth organizations, members of regional regional councils of the KNPI throughout West Java, former young leaders of West Java, some university students in Bandung and the like. Secondary data collection was carried out through extensive documentary data analysis.

The result of this research indicates that the KNPI of West Java has contributed a significant role of the political development such as proposed by Samuel P. Huntington. Nevertheless, since Indonesian political system is under the bureaucratic polity and the hegemonic party system, the KNPI has not been able in fulfilling its important role as expected. The KNPI participated in the policy process through the legislature but its role in political articulation, political aggregation, political socialization, political recruitment, and political communication has been performed independently.

Keywords: *Indonesian youth group/KNPI -- political development -political participation*

1) *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung*

2) *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

PENGANTAR

Menurut David Apter (1978) kelompok kepentingan merupakan bagian yang esensial di dalam setiap sistem politik demokrasi, karena kelompok kepentingan dapat menjadi alternatif lain yang dapat memampukan berbagai macam tuntutan dalam masyarakat modern yang seluruhnya tidak dapat dilayani oleh partai politik.

Dalam sistem politik Indonesia, kelompok kepentingan dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Di satu sisi, organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan berfungsi sebagai suatu wadah dan sarana yang menyalurkan aspirasi atau kepentingan anggotanya. Di sisi lain, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi yaitu kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kondisi sistem politik Indonesia sekarang ini, peranan organisasi kemasyarakatan nampaknya selalu bersifat mendua, di satu sisi berfungsi menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan kelompoknya dan di sisi lain berfungsi sebagai pelaksana kebijaksanaan. Dengan demikian kelompok kepentingan menurut konsep Barat tidak secara mutlak sama dengan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami tiga kali proses perubahan politik yaitu Demokrasi Liberal/Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila yang secara efektif berlangsung dari tahun 1968 sampai dengan sekarang. Proses perubahan politik ini, tidak dapat dilepaskan dari peranan pemuda. Fakta telah menunjukkan bahwa pemuda merupakan suatu kekuatan yang menggerakkan sejarah Indonesia. Mereka muncul tepat pada saat-saat terjadi perubahan sosial politik yang besar.

Sebelum revolusi kemerdekaan pemuda dan organisasi-organisasi pemuda berjuang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam melawan kolonialisme Belanda dengan politik pecah belahnya. Kemudian secara nasional, mereka mengikrarkan "Sumpah Pemuda 1928".

Pada masa Demokrasi Liberal/Parlementer, pemuda merupakan sumber mobilisasi politik partai politik, karena pada masa ini kebanyakan partai politik menghimpun dan membina massa dengan membentuk organisasi-organisasi kepemudaan. Di kalangan kepemudaan, muncul keinginan untuk mempersatukan pemuda melalui fusi dan federasi di satu pihak, dan di lain pihak dihadapkan pada pilihan antara organisasi pemuda intrauniversiter serta ekstrauniversiter. Pada proses selanjutnya terbentuk Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI) yang merupakan organisasi intrauniversiter, adalah gabungan dari Dewan Mahasiswa dan Senat Perguruan Tinggi se Indonesia, dan Pererhimpunan Persatuan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang merupakan organisasi ekstrauniversiter. Disamping organisasi-organisasi tersebut juga muncul organisasi yang datang dari blok Barat dan blok Timur yang

saling berebut pengaruh untuk merangkul pemuda yaitu Internasional Conference of Student (ICS) dari blok Barat, dan Internasional Union of Student (IUS) dari blok Timur.

Sebelum peristiwa G 30 S/PKI, PPMI dan MMI dikuasai oleh CGMI dan GMNI, sedangkan kekuatan Katolik, Protestan, dan Islam tradisional (PMII) menjadi kekuatan minoritas. Situasi kehidupan politik yang diwarnai persaingan dan konflik di kalangan kepemudaan beriringan dengan konflik partai-partai politik berlangsung sampai dengan masa Demokrasi Terpimpin. Periode ini ditandai dengan adanya konflik yang semakin menonjol antara organisasi pemuda. Organisasi-organisasi pemuda yang bernaung di bawah PKI, seperti GPI, Pemuda Rakyat, CGMI, ingin membubarkan HMI, karena HMI mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan mahasiswa, dan dianggap akan mengancam dominasi CGMI di dalam PPMI. Organisasi pemuda di bawah naungan PKI tersebut dibantu dan didukung oleh PKI berusaha mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI. Namun usaha ini ternyata gagal.

Pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, organisasi kepemudaan memainkan peranan yang sentral dan menentukan, mereka bersama-sama dengan komponen Orde Baru lainnya menuntut diadakan pembaharuan politik. Para pemuda bergabung menjadi satu dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). KAMI yang didukung oleh ABRI serta komponen Orde Baru lainnya mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang kemudian dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Ketika Orde Baru mulai mengadakan konsolidasi politik, nampaknya KAMI sebagai kekuatan politik peranannya mulai melemah, mereka kembali ke kehidupan kampus, dan mereka merubah format perjuangannya dengan mendirikan Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, dan Badan Permusyawaratan Mahasiswa. Sementara organisasi ekstrauniversiter juga tidak menampakkan peranannya. Keadaan demikian adalah sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang mereka alami pada masa pasca G 30 S/PKI.

Pada awal tahun 1970-an muncul pemikiran di kalangan tokoh-tokoh pemuda untuk membentuk suatu wadah kegiatan pemuda/mahasiswa di luar kampus yang mampu menggalang potensi generasi muda serta menampung aspirasi pemuda/mahasiswa. Pemikiran para tokoh pemuda tersebut merupakan reaksi terhadap situasi dan kondisi kepemudaan mengalami keadaan vakum. Proses selanjutnya, untuk merealisasikan ide pembentukan satu wadah pemuda tersebut, para tokoh pemuda mulai merintisnya melalui pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh pemuda. Disamping itu mereka melakukan konsultasi dengan beberapa pejabat pemerintah, dan pada akhirnya terbentuklah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tahun 1973 sebagai wadah bergabung organisasi kemasyarakatan pemuda. Setelah terbentuk KNPI, tokoh-tokoh pemuda di daerah mendesak untuk mendirikan KNPI di Tingkat Daerah. Kemudian atas desakan tokoh-tokoh pemuda di daerah tersebut, dibentuklah KNPI di daerahdaerah. De-

ngan demikian KNPI merupakan organisasi nasional yang memiliki cabang-cabang di Daerah Tingkat I dan Tingkat II, sampai di Tingkat Kecamatan.

KNPI sebagai organisasi pemuda, bertujuan memelihara dan mengembangkan persatuan dan kesatuan pemuda, mengembangkan kader-kader bangsa yang berkualitas dan ikut serta dalam proses pembangunan nasional, dan berfungsi sebagai wadah kaderisasi pemuda untuk dipersiapkan menjadi pimpinan bangsa yang mampu menjamin kesinambungan perjuangan bangsa serta menyerap aspirasi pemuda untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemuda serta melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan program nyata sesuai dengan keahlian/keterampilan dan fungsinya dalam masyarakat. KNPI dalam kedudukannya sebagai kelompok kepentingan, "tidak bertujuan" memperoleh kekuasaan politik seperti halnya partai politik.

Dengan demikian keberadaan KNPI di dalam sistem politik Indonesia sangat diperlukan, yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan masyarakat terutama kepentingan-kepentingan generasi muda. KNPI merupakan satu-satunya wadah bergabung organisasi pemuda yang terdiri dari berbagai macam organisasi pemuda yang memiliki latar belakang pembentukan serta orientasi program di masyarakat sejalan dengan kekuatan politik yang ada. Sebagai contoh adalah: banyak kader organisasi kemasyarakatan pemuda (ormas pemuda) yang melanjutkan karir politik ke organisasi politik yang menjadi pilihannya seperti mereka yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pemuda Demokrat Indonesia ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Pemuda Muslimin Indonesia ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Generasi Muda Kosgoro, Wira Karya Indonesia, Generasi Muda MKGR, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan ABRI (FKPPI) ke Golongan Karya (Golkar). Di luar itu, organisasi yang tidak berorientasi langsung kepada ketiga partai politik, melanjutkan karir politiknya baik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) maupun Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Karena sesuai dengan tujuan KNPI, mereka dapat meniti karir politik berdasarkan pada pilihan serta orientasinya masing-masing.

Aktivitas dan kebersamaan mereka selama di KNPI nampaknya mempengaruhi visi dan orientasi politiknya. Hal ini terlihat dalam keberadaan mereka di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, maupun di dalam partai politik, sejalan dengan sistem politik yang berlaku.

Menurut Afan Gaffar (1990), sistem politik Indonesia ditandai dengan adanya satu kekuatan politik (partai politik) yang dominan dalam kurun waktu yang relatif lama, dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Kondisi seperti ini disebut dengan istilah sistem partai hegemonik. Di dalam sistem partai hegemonik, partai-partai politik dan organisasi sosial diakui eksistensinya akan tetapi peranan mereka dibuat semiminal mungkin terutama pada pembentukan pendapat umum. Di dalam pembentukan keputusan, partai dan organisasi sosial berperan terba-

tas pada pembentukan agenda atau "agenda setting".

Dari sudut pandang lain, Karl D. Jackson (1990) mengatakan bahwa di dalam sistem politik Indonesia, lembaga politik birokrasi sangat dominan, sementara lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik, dan kelompok kepentingan menjadi lemah dan tidak dapat memberikan "balance" serta kontrol terhadap birokrasi secara politis - dan secara ekonomis, menjadi pasif. Menurutnya, Indonesia merupakan masyarakat politik birokratik.

Fenomena demikian menunjukkan bahwa peran pemerintah/negara lebih dominan dibandingkan dengan organisasi sosial-politik. Keadaan seperti digambarkan di atas, oleh Phillip Schmitter (1974) dikatakan sebagai suatu model corporatism. Dalam pada itu menurut analisis Dwight King (1987) terhadap kepolitikan Indonesia Orde Baru menerapkan sistem korporatisme-negara.

Apabila KNPI sebagai kelompok kepentingan dikaitkan dengan sistem partai hegemonik dan masyarakat politik birokratik, serta sistem korporatisme-negara, maka menurut hemat penulis, KNPI tidak akan dapat memperlihatkan peranannya secara optimal dalam pembangunan politik karena tidak ada kesempatan atau peluang untuk berperan sebagaimana fungsinya. Sementara menurut Lucian W. Pye (1966), bahwa pembangunan politik memerlukan adanya semangat umum atau sikap adanya persamaan, dalam pengertian bahwa pembangunan politik menekankan keterlibatan massa dan keikutsertaan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa secara normatif proses pembaharuan di Indonesia tidak terfokus pada satu acuan akan tetapi lebih ditujukan pada adanya keseimbangan, sebagaimana tertuang di dalam GBHN yaitu bahwa "... pembaharuan kehidupan politik untuk meningkatkan fungsi infra struktur dan supra struktur politik serta interaksi secara terbuka antar dan antara keduanya sesuai dengan Demokrasi Pancasila; meningkatkan dan mengembangkan kesadaran politik rakyat; meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kemandirian infra struktur politik; meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan politik" (GBHN, 1993). Dengan demikian maka peranan KNPI dalam proses pembangunan politik merupakan wadah yang paling strategis, karena mengingat bahwa pemuda menjadi sumber daya manusia yang potensial.

Peranan KNPI dalam pembangunan politik, secara teoritis dapat dilakukan melalui berbagai bentuk partisipasi politik seperti pemberian suara atau pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi (contacting). Namun di dalam kondisi sistem partai hegemonik dan masyarakat politik birokratik seperti diuraikan di atas tentu akan berpengaruh terhadap peranan KNPI dalam pembangunan politik.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Apa dan bagaimana peran KNPI dalam proses pembangunan politik?

Untuk membantu menjawab permasalahan tersebut, penulis akan

menggunakan seperangkat teori yang sedikit banyak memiliki relevansi dengan kajian tesis ini, dan sekaligus akan digunakan untuk menganalisis.

Lucian W. Pye (1966) mengemukakan ciri-ciri pokok pembangunan politik adalah: 1) Semangat umum atau sikap terhadap persamaan. Dalam kebanyakan pandangan mengenai masalah ini, pembangunan politik melibatkan partisipasi massa dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. 2) Kemampuan atau kapasitas suatu sistem politik. Kapasitas ini dihubungkan dengan output sistem politik dan kadar kemampuan sistem politik dalam mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi. 3) Diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi dan spesialisasi terutama berlaku dalam analisis mengenai struktur-struktur dan lembaga-lembaga masyarakat. Diferensiasi dapat meningkatkan spesialisasi fungsional dari berbagai peranan dalam sistem politik. Diferensiasi bukan fragmentasi dan isolasi bagian yang berbeda dalam sistem politik akan tetapi spesialisasi yang berdasarkan pada rasa integrasi, sehingga memungkinkan terciptanya pembagian kerja dalam pemerintahan.

Untuk kepentingan penyusunan tesis ini, penulis menggunakan tolok ukur semangat umum atau sikap terhadap persamaan, yaitu partisipasi politik.

Berdasarkan pada pengertian pembangunan politik sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu tuntutan bagi setiap sistem politik.

Huntington dan Nelson (1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai "activity by private citizens designed to influence governmental decision-making". Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik "tidak hanya aktivitas yang direncanakan oleh si aktor sendiri untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah akan tetapi juga aktivitas yang direncanakan oleh seseorang (bukan si aktor) untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Yang pertama disebut sebagai partisipasi otonom dan yang kedua disebut sebagai partisipasi yang dimobilisasi".

Samuel P. Huntington (1976) mengemukakan bentuk partisipasi politik yaitu:

- a. *Electoral Activity*, termasuk pemberian suara, bantuan-bantuan kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, menarik masuk atas nama calon, atau tindakan lain yang direncanakan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying*, termasuk usaha-usaha yang dilakukan secara individual atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan suatu pandangan guna mempengaruhi keputusan-keputusan mereka atas persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah orang-orang.
- c. *Organizational activity*, yang melibatkan partisipasi sebagai seorang anggota atau petugas organisasi yang mempunyai tujuan utama dan eksplisit mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

- d. *Contacting* (mencari koneksi), yaitu tindakan individual yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau segelintir orang.
- e. *Violence*, yaitu tindakan individual atau kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah dengan melakukan kerusakan fisik terhadap manusia atau benda.

Dari bentuk partisipasi di atas, apabila dikaitkan dengan organisasi kemasyarakatan khususnya KNPI, maka partisipasi politik pada masa Orde Baru lebih ditujukan pada partisipasi konvensional atau aktivitas-aktivitas yang positif, bukan non-konvensional atau tindak kekerasan.

Untuk memberikan pemahaman mengenai kelompok kepentingan, selanjutnya penulis akan mengemukakan konsep kelompok kepentingan yang dapat membantu dalam mencermati peranan KNPI.

Gabriel A. Almond mendefinisikan kelompok kepentingan "adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik" (Hagopian, Mark N., 1978).

Secara normatif organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985:

"Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam Wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".

Apabila konsep dan fungsi organisasi kemasyarakatan dicermati maka organisasi kemasyarakatan dapat dianalogikan dengan kelompok kepentingan seperti diuraikan di atas. Namun konsep dan fungsi kelompok kepentingan berdasarkan konsep Barat tidak mutlak sama dengan organisasi kemasyarakatan, karena disesuaikan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktek politik di Indonesia pada masa Orde Baru, organisasi kemasyarakatan tidak hanya berfungsi mengartikulasikan kepentingan dari masyarakat pada pembuat keputusan pemerintah akan tetapi lebih cenderung sebagai pelaksanaan kebijaksanaan.

CARA PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan berdasarkan pada 3 tahapan yaitu : 1) Pengumpulan data, 2) Analisis data, 3) Uraian hasil analisis data.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku teks,

jurnal-jurnal, majalah-majalah, surat kabar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dan diseleksi, penulis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan KNPI dalam Pembangunan Politik akan penulis analisis berdasarkan landasan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976) yang meliputi: 1. Kegiatan pemilihan, 2. Kegiatan lobbying, 3. Kegiatan organisasi, 4. Mencari koneksi (*contacting*).

Berikut ini penulis akan menguraikan peranan KNPI Propinsi DT. I Jawa Barat dalam Partisipasi Politik.

a. Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemilihan ini berkaitan erat dengan kegiatan pemilihan nasional atau pemilihan umum.

KNPI adalah suatu organisasi kemasyarakatan oleh karena itu secara organisatoris KNPI tidak terlibat dalam pemilihan umum, akan tetapi anggota KNPI secara perorangan (stelsel aktif) terlibat dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih, sebagai panitia pemilihan umum, sebagai juru kampanye, dan sebagai calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum (OPP), tergantung pada peran yang disandang oleh masing-masing.

Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa pada pemilihan umum 1992 yang lalu, 100% fungsionaris KNPI menggunakan hak pilih mereka, dan kurang lebih 65% aktif sebagai panitia maupun juru kampanye dari OPP pilihan mereka. Bahkan diantaranya dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Secara perorangan kegiatan fungsionaris KNPI antara lain sebagai anggota Badan Pengendali Pemenangan Pemilu (BAPPILU), Satuan Tugas (Satgas), dan menjadi Juru Kampanye (Jurkam). Ternyata sebagian besar keterlibatan pemuda/OKP terkonsentrasi ke dalam Golongan Karya, satu orang aktif membantu PPP, satu orang aktif membantu PDI. Keterlibatan sebagian besar fungsionaris KNPI dan OKP ke dalam Golkar merupakan konsekuensi logis dari komposisi fungsionaris KNPI yang sebagian besar berasal dari OKP yang dependent atau interdependent dengan Golongan Karya.

Secara historis, psikologis, dan hubungan emosional, kontribusi masing-masing anggota KNPI terhadap OPP nampaknya terkait dengan keberadaannya di organisasi kemasyarakatan pemuda. Dari 45 fungsionaris KNPI, aspirasi politik mereka ke OPP adalah sebagai berikut: 3 OKP ke PPP, 19 OKP ke Golongan Karya, dan 1 OKP ke PDI. Oleh karena itu pada pemilu 1992, banyak dari mereka yang aktif berkampanye mendukung Golongan Karya.

Kenyataan ini yang merupakan salah satu faktor mengapa timbul

kesan dari masyarakat bahwa KNPI merupakan satu wadah kaderisasi Golongan Karya sebagaimana diterangkan sebelumnya yaitu pada Bab II, Sub. D. Karena fenomena yang terjadi adalah KNPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang unsur keanggotaannya didominasi oleh OKP yang berorientasi ke Golongan Karya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kondisi demikian bukan merupakan indikasi bahwa KNPI merupakan satu jaring yang dibuat oleh suatu partai politik yang bertugas untuk mengagregasi kepentingan massa yang kemudian disalurkan ke partai politik, karena partai politik hanya akan dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal kalau memiliki organisasi massa yang mendukungnya, yang berperan dalam memelihara pendukung tetap yang secara konsisten memberi dukungan kepada program partai. Kondisi demikian akan menambah kuatnya satu partai politik dalam kehidupan politik Indonesia. Dalam hal dukungannya terhadap salah seorang untuk calon anggota legislatif, KNPI secara organisatoris tidak pernah mengusulkan akan tetapi mendukung aktivis KNPI yang dicalonkan oleh Organisasi Peserta Pemilihan Umum.

b. KNPI dalam Kegiatan Lobbying

Beberapa fungsionaris KNPI terutama Ketua, Bendahara, dan Sekretaris (pengurus inti) mengadakan lobbying dengan Pemerintah Daerah, baik dengan legislatif yaitu DPRD Propinsi DI. I Jawa Barat maupun dengan Eksekutif yaitu Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat yang terdiri dari Gubernur, Panglima, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kapolda, serta dengan Pimpinan Organisasi sosial-politik yaitu PPP, Golongan Karya, dan PDI.

Kegiatan-kegiatan lobbying biasanya dilakukan dalam bentuk: 1) audiensi, 2) dengar pendapat, 3) silaturahmi, 4) forum komunikasi yaitu Forum Bale Kambang (yang berlangsung di Jawa Barat).

Biasanya fungsionaris KNPI melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Daerah pada saat-saat menjelang dan sesudah Kongres, Musda, atau Rakerda KNPI.

Menjelang diselenggarakannya Kongres, KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengadakan rapat koordinasi dengan OKP dalam rangka memadukan pandangan-pandangan dari masing-masing OKP mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat khususnya yang menyangkut kepemudaan. KNPI juga mengadakan kontak dengan Penda agar dapat mensinkronkan antara kebijaksanaan daerah Jawa Barat dengan kebijaksanaan serta rencana penyusunan program umum KNPI yang akan diusulkan dalam kongres.

Setelah kongres, KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, melaporkan hasil kongres kepada Pemda dan mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Musda Tingkat I. Kemudian menyelenggarakan Musda yang akan menyusun Program Daerah, menyusun dan menetapkan Majelis Pemuda Daerah, memilih dan mengangkat anggota DPD, menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD Tingkat I.

Seperti apa yang dilakukannya menjelang Kongres, sebelum dise-

lenggarakan Musda Pemuda/KNPI Tingkat I Jawa Barat, KNPI mengadakan rapat koordinasi dengan OKP dan selanjutnya menghubungi Pemda dan para pimpinan partai politik, guna menyampaikan serta membicarakan persiapan dan materi Musda.

Apabila dicermati, kegiatan-kegiatan lobbying yang dilakukan oleh KNPI sebagai organisasi kemasyarakatan dengan pejabat-pejabat Pemda dan pemimpin-pemimpin politik sebagaimana diuraikan di atas, nampaknya KNPI lebih bersifat memanfaatkan kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemda. Sebagaimana dikemukakan beberapa fungsionaris KNPI Propinsi DT. I Jawa Barat yaitu, walaupun muncul inisiatif atau usulan yang datang dari KNPI akan tetapi tidak bersifat substansial, dan selalu *committed* dengan pemerintah. Dalam nuansa yang sama, salah seorang penanda tangan Deklarasi Pemuda Jawa Barat 1974 mengatakan bahwa fungsi artikulasi KNPI kapasitasnya sebagai organisasi kemasyarakatan tidak nampak kecuali yang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah.

c. KNPI dalam Kegiatan Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, KNPI memiliki kedudukan yang sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian maka di satu segi, KNPI merupakan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan di segi lain, KNPI merupakan suatu organisasi tempat berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda.

Aktivitas KNPI dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, pertama, dapat dilihat dari keterlibatannya dalam KNPI sebagai fungsionaris, kedua, mereka merupakan wakil dari salah satu organisasi kemasyarakatan pemuda, ketiga, beberapa orang merangkap menjadi anggota dua organisasi pemuda di luar KNPI, dan keempat, mereka juga merangkap sebagai anggota dari salah satu partai politik. Di antara ke empat puluh lima fungsionaris itu, beberapa diantaranya merangkap sebagai anggota organisasi kemasyarakatan pemuda lain dan sebagai anggota atau aktivis partai politik tertentu.

Seorang wakil ketua KNPI disamping menjadi anggota 2 (dua) OKP menjabat sebagai anggota DPRD Tingkat I Jawa Barat Periode 1992 - 1997 yang mewakili Golongan Karya. Seorang lagi yaitu Wakil Sekretaris menjadi anggota 2 (dua) OKP menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Bandung mewakili PPP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapasitas mereka sebagai fungsionaris atau anggota OKP, baik di dalam KNPI dan di dalam OKP lain, dapat dikatakan suatu aktivitas organisasi atau bentuk partisipasi politik.

Fungsionaris KNPI melakukan aktivitas sesuai bidangnya masing-masing dengan berdasarkan pada program kerja daerah dan mengacu pada Program Daerah yang telah ditetapkan di dalam Musda.

Program kerja DPD KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tahun 1992 - 1993 dan tahun 1993 - 1994 menitik beratkan pada karya nyata dengan mengaplikasikan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dan

kebijaksanaan nasional.

Dari sejumlah 75 kegiatan selama satu triwulan, nampak bahwa kegiatan KNPI sebagian besar hanya bersifat *ceremonial*. Kegiatan-kegiatan program nyata sebagaimana dituangkan di dalam program kegiatan KNPI justru hanya dilakukan beberapa kali saja. Kondisi seperti ini yang terjadi atau berlangsung di KNPI, dari tahun ke tahun, dari periode kepengurusan ke periode kepengurusan selanjutnya. Kalau memang KNPI menempatkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan dan berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan maka aktivitas KNPI tidak atau kurang menyentuh pada fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dapat menyalurkan kepentingan pemuda, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat hanya merupakan suatu "Organisasi Pemuda Simbolis".

d. KNPI dalam kegiatan Mencari Koneksi (Contacting)

Bagi fungsionaris KNPI kecenderungan ke arah memperoleh keuntungan biasanya bertujuan untuk memperoleh dukungan promosi dirinya dalam jabatan-jabatan pemerintahan maupun politis.

Di Jawa Barat jabatan-jabatan pemerintahan maupun politis sangat ditentukan oleh penentu kebijaksanaan, baik di pemerintahan maupun politis dalam hal ini adalah kekuatan politik yang dominan pada masa Orde Baru yaitu Golkar, yang secara operasional dan historis tampilnya Golkar sebagai penentu kebijaksanaan didukung oleh ABRI dan Birokrat/Korpri. Oleh karena itu dalam praktek politik anggota dan fungsionaris KNPI Propinsi DT. I Jawa Barat, seringkali mereka melakukan hubungan dengan Panglima Daerah Militer Siliwangi (Pangdam) melalui Asisten Sosial Politik Komando Daerah Militer Siliwangi (Assospoldam), hubungan dengan Gubernur sebagai pembina Korpri/Birokrat melalui Kepala Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat (Kaditsospol), dan hubungan dengan DPD Golkar Jawa Barat.

Anggota dan Fungsionaris KNPI memberikan bantuan kepada Parpol/Golkar antara lain membantu keberhasilan Parpol/Golkar dalam memenangkan pemilu; sementara bantuannya kepada ABRI dan Pemda turut serta melaksanakan dan mensukseskan program-program ABRI maupun Pemda.* Ketika mereka sudah tidak berada dalam KNPI, mereka mulai memantapkan/mengintensifkan hubungan dengan ABRI maupun Pemda untuk kepentingan masing-masing.

Banyak mantan fungsionaris KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang pernah dan masih berada dalam lembaga-lembaga pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif.

* Ketika seseorang masih menjadi fungsionaris KNPI, dalam menghubungi penentu kebijaksanaan lebih banyak mencari peluang untuk berperan serta dengan memberikan jasa-jasanya, dan biasanya mereka belum mengkonsentrasikan pada keuntungan. Ketika mereka sudah keluar dari kepengurusan KNPI, mereka mulai mencari "imbalan" yang saling menguntungkan.

Sampai dengan selesainya penelitian ini dapat dihimpun data dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1994 yakni sejak berdirinya KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, mantan pengurus KNPI Propinsi DT. I Jawa Barat yang pernah atau masih dalam jabatan-jabatan politis maupun pemerintahan adalah sebagai berikut::

Di dalam jabatan legislatif: Mereka yang menjadi anggota MPR/DPR, berjumlah delapan orang, tujuh orang mewakili Golongan Karya, satu orang mewakili PDI; Dalam MPR/DPR dan DPRD Tingkat I, berjumlah tujuh orang, satu orang mewakili PPP, enam orang mewakili Golongan Karya; Dalam DPRD Tingkat I, berjumlah dua puluh satu orang, dua orang mewakili PPP, delapan belas orang mewakili Golkar, dan satu orang mewakili PDI; Dalam DPRD Tingkat II, berjumlah lima orang, satu orang mewakili PPP, dan empat orang mewakili Golkar.

Di dalam jabatan Eksekutif: Dari hasil penelitian yang diperoleh, beberapa orang mantan fungsionaris KNPI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang duduk dalam jabatan eksekutif adalah sebagai Bupati Kabupaten DT. II Tasikmalaya, sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten DT. II Garut, sebagai Ketua Bappeda Propinsi DT. I Jawa Barat, yang kesemuanya masih menjalankan fungsinya. Jabatan-jabatan eksekutif tersebut dikuasai oleh mereka yang berorientasi kepada Golongan Karya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penulis sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut::

1. Dalam banyak hal Indonesia (Orde Baru) adalah negara korporatis, dimana representasi dari kepentingan-kepentingan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga secara hirarkhis disesuaikan dengan hirarkhis kekuasaan negara. Pemuda sebagaimana halnya kelompok lainnya di dalam masyarakat seperti kelompok pekerja, petani, nelayan, pengusaha dan guru diorganisasikan dalam kerangka korporatime-negara. Akan tetapi merupakan suatu hal yang unik dari KNPI yang berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti SPSI, HKTI, HSNI, KADIN, PGRI, KNPI lebih bersifat konfederatif, karena KNPI bukan merupakan satu-satunya kelompok atau organisasi pemuda sehingga KNPI bukan merupakan satu-satunya representasi kepentingan pemuda di Indonesia. Dengan demikian sebenarnya konsep korporatisme negara tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk organisasi kepemudaan di Indonesia. Mengapa demikian ? Karena organisasi-organisasi kepemudaan yang berhimpun dalam KNPI pada umumnya bersifat independen yang memiliki warna dan tujuan masing-masing. Dan yang lebih substantif yang berkenaan dengan hakekat dunia kepemudaan adalah bahwa dunia kepemudaan secara substantif berbeda dengan segmen lain dari masyarakat. Organisasi pemuda secara historis sudah sangat bervariasi sesuai dengan aliran sosial dalam masyarakat, seperti misalnya Islam, Kristen, Katolik, Sosialis, Nasionalis dan lain-lainnya. Dengan latar belakang historis seperti itu maka sulit sekali bagi negara untuk mengatur pemuda secara korporatis sebab akan mendapatkan reaksi kuat dari kalangan pemuda.

2. Secara teoritis KNPI sebagai kelompok kepentingan telah melaksanakan peranannya dalam pembangunan politik, namun secara praktis, KNPI sebagai organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan tidak berperan karena perannya hanya sebatas pada partisipasi politik yang sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, sehingga kurang menampakkan fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik sebagaimana tuntutan dari fungsi kelompok kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almond, Gabriel, dan James S. Coleman (eds), 1960, *The Politics of The Developing Areas*, Princeton University Press, New York.
- Almond, Gabriel, dan Bingham Powell, 1966, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Little Brown and Company, Boston, Toronto.
- , 1974, *Comparative Politics Today: A World View*, Little Brown and Company, Boston, Toronto.
- Alfian, 1978, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- , 1990, *Hasalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- , (ed), 1981, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Crouch, Harold (Terjemahan Sinar Harapan), *Militer dan Politik*, 1976, Ithaca, New York.
- Duverger, Maurice, 1981, *Partai-Partai Politik dan Kelompok Penekan*, Terjemahan Lila Hasyim, Bina Aksara.
- Feith, Herbert, 1968, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Harison, Reginald, J. 1980, *Pluralism and Corporatism, The Political Evolution of Modern Democracies*, George Allen and Unwin, Ltd. Boston, Sidney.
- Hagopian, Mark N., 1978, *Regimes, Movement, and Ideologies*, Longman, New York.
- Huntington, Samuel P., dan Joan M. Nelson, 1976, *No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries*.

Majalah:

- Forum Pemuda, 1985, Nomor 62, Jakarta.
- , 1985, Nomor 63, Jakarta.
- , 1986, Nomor 74, Jakarta. *Hukum dan Demokrasi*, 1994, Nomor 4, Tahun ke III, 9 Juni 1994. *Mingguan Mahasiswa Indonesia*, 1966, 30.

Bahan-Bahan Bacaan Lain:

- Materi Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI VI, Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Barat, 1 - 4 Oktober 1991, Bandung.
- Kumpulan Peraturan Organisasi, Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI VI, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1 - 4 Oktober, 1991, Bandung.
- Laporan Pertanggungjawaban, DPD KNPI Propinsi DT. I Jawa Barat, Masa Bakti 1988 - 1991, Musyawarah Daerah Pemuda/KNPI VI, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1 - 4 Oktober, 1991, Bandung.
- Materi Rapat Kerja Daerah, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Propinsi DT. I Jawa Barat, 21 - 23 Desember, 1992, Bandung.
- Hasil Musda Pemuda/KNPI, Propinsi DT. I Jawa Barat VI, 1 - 4 Oktober, 1991, Bandung, Pusdik Komlek Sukajadi.